



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	2019	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3. Kementerian ...

Salinan sesuai
dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Pelaku ...

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		1.2. Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Informasi Geospasial 4. Badan Pusat Statistik 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota

Selamat sesuai dengan aslinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		1.3. Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial

Salinan sesuai dengan aslinya

2019.1.2019

5. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
2.	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1. Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2019-2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		2.2. Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	2021	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		2.3. Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2020-2024 2020-2024	Badan Informasi Geospasial	3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
3.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	3.1. Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian ... 5. Pemerintah Provinsi 6. Gubernur/Kota Pelaku Usaha

Seluruh sesuai dengan aslinya

2024.01.11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha

3.2. Melaksanakan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

N

2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		3.2. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Sah dan sesuai
dengan aslinya

W

7. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
4.	Peningkatan sinergitas antar kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1. Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2019 – 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Perdagangan

Salinan sesuai dengan aslinya

5. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		4.2. Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/ lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/ lembaga	2019 - 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pertanian
						5. Kementerian Dalam Negeri 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

4. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6. Kementerian Perdagangan 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9. Badan Informasi Geospasial

Selama sesuai dengan aslinya

10. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
5.	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pelaku Usaha

Selama sesuai
dengan aslinya

6. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
6.	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

5. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
7.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2020	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya

W



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		7.2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

4. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai
dengan aslinya

2. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.2. Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	2020-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha

8.3.3. Mengembangkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.3. Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terjalinya kerja sama kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau c. BUMN Perkebunan	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih

8.4. Memfasilitasi ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.4. Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap satu untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap satu dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten / Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih
		8.5. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Tertersedianya dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten / Kota

9. Peningkatan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2019-2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
9.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (<i>Good Agricultural Practices / GAP</i>)	9.1. Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2020	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
		9.2. Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun mitraan para pihak secara periodik	Tersusunnya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun mitraan para pihak secara periodik.	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		9.3. Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya

2. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
10.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun					2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		9.4. Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2020 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
10.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1. Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi.	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Salinan sesuai
dengan aslinya

3. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

Selama sesuai dengan aslinya

10.3. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.3. Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPS) dan sumber lain yang sah	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pelaku Usaha
		10.4. Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya

4. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.5. Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pelaku Usaha 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

11. Percepatan ...

Salinan sesuai dengan selnya

11. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
11.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1. Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala 11.1.2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 – 2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

11.2. Memperkuat ...

Selaman sesuai
dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		11.2. Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

11.3. Menyusun ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

11.3. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		11.3. Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandani Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	2020	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		11.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
12.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

12.2. Meningkatkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		12.2. Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		12.3. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha

12.4. Melakukan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

30/01/2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		12.4. Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
13.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1. Menyusun regulasi perlindungan kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	2019 - 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha
			13.2.2. Tersedianya data jumlah	2019 - 2024		1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan			
		13.3. Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

13.4. Meningkatkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.4. Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	2019-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

13.5. Meningkatkan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

13.5. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.5. Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2019-2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		13.6. Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di	2019 – 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

✓

provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
14.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam	provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2019 - 2020	Kementerian Pertanian	3. Badan Restorasi Gambut
			13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit			4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha
14.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di	2020-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selamat sesuai dengan aslinya

W

pencerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan			2. Kementerian Dalam Negeri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. Badan Restorasi Gambut 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha
		14.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Salinan sesuai
dengan aslinya

✓

3. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		14.3. Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1. Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit 14.3.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar	2019 – 2024 2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Salinan sesuai dengan aslinya

perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun			4. Badan Restorasi Gambut 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha
		14.4. Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha
		14.5. Menyusun peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Salinan sesuai
dengan aslinya

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
15.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1. Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha 6. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

15.2. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.2. Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		15.3. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2021-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

Saham sesuai dengan aslinya

15.4. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.4. Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten / Kota 5. Pelaku Usaha
		15.5. Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2021 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.6. Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

16. Pengukuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
16.	Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (<i>measurement, reporting, and verification/MRV</i>) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi	2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		16.2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
17.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1. Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

17.2. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		17.2. Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		17.3. Membangun data dasar pertanian dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanian dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	2020-2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2. Kementerian Pertanian 3. Badan Restorasi Gambut 4. Badan Informasi Geospasial 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha
		17.4. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2020-2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
18.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan ... 5. Badan Restorasi Gambut 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota 8. Pelaku Usaha

Selama sesuai dengan isinya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		18.2. Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 4. Pelaku Usaha

18.3. Meningkatkan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		18.3. Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 4. Pelaku Usaha
19.	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) sebagai energi terbarukan	19.1.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif	2020-2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Salinan sesuai
dengan aslinya

19.1.2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penguang Jawab	Instansi Pendukung
			19.1.2. Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan			3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

D. TATA KELOLA PERKEBUNUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

20.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	20.1. Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	2019-2021	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-----	--	--	---	------------------	------------------------------	--

3. Kementarian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		20.2. Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	2019-2020	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

Saham sesuai dengan akunya

000000

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

55

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
21.	Melakukan penanaman sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1. Membentuk tim mediasi penanaman sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanaman sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya tim mediasi penanaman sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2. Tersedianya tim mediasi yang memiliki	2020-2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

kemampuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			kemampuan dalam penanganan sengketa lahan			5. Pemerintah Kabupaten/Kota
		21.2. Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota

21.3. Melakukan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2020-09-01



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		21.3. Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024 2020 – 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota
22.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1. Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2019 – 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		22.2. Menyelesaikan keterlanjutan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjutan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2019 - 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

2019/09/11

22.3. Melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		22.3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2019 - 2021 2019-2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

22.3.3. Tersedianya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan	2019 - 2021		
		22.4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan				4. Pemerintah Kabupaten/Kota
23.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	23.1. Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota

23.2. Melakukan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		24.2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2019-2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota
			24.2.2. Tersedianya peta indikator kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2019-2023		

Salinan sesuai dengan aslinya

24.2.3. Tersedianya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
25.	Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial	25.1. Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit 24.2.3.Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2019-2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

1. *Staphylococcus aureus*

Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	25.2. Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020-2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		25.3. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

25.4. Pengawasan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		25.4. Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementrian Ketenagakerjaan	1. Kementrian Pertanian 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

Selaman sesuai
dengan aslinya

E. DUKUNGAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

26. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	26.1. Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2020-2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Standardisasi Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
	26.2. Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatkan jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

26.2.2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

68

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penguang Jawab	Instansi Pendukung
27.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	27.1. Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO 27.2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah	26.2.2. Meningkatkan jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2019 - 2024		
		27.3. Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2020-2022	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

27.4. Menyenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		27.4. Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		27.5. Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Badan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penguang Jawab	Instansi Pendukung
28.	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional	28.1. Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2021	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

5. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.2. Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tertaksananya koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020-2024	Kementerian Luar Negeri	5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya

6. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.3. Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2024	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha

28.4. Menyelenggarakan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.4. Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2024	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha

28.5. Melakukan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.5. Melakukan kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importir menuju keberterimaan ISPO	2024 2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Standardisasi Nasional 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 5. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perencanaan,



Satya Bhakti Parikesit